





KR-Franz Boedisoeekarnanto

Rachmad Fazari memberikan penjelasan.

Rachmad juga menjamin pajak yang disetor wajib pajak seluruhnya masuk ke kas negara. Selain itu, wajib pajak tidak perlu khawatir akan dipersulit oleh petugas pajak. Menurutnya, petugas pajak diawasi secara ketat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kejahatan penyelewengan wewenang pelayanan pajak merupakan kejahatan luar biasa sehingga pena-

nganannya juga secara luar biasa. Bahkan untuk mengantisipasi penyelewengan wewenang, seluruh petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai level pelaksana wajib melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta akan kembali mem-

berikan layanan jemput bola pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selama satu bulan selama September mendatang, loket pembayaran PBB akan digilir ke tiap kantor kecamatan.

Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan DPDPK Kota Yogyakarta, Santoso SE mengungkapkan, terdapat 92.051 wajib pajak (WP) PBB yang ditargetkan realisasinya mencapai Rp 48 miliar. Hingga Juli sudah terealisasi 41,34 persen atau Rp 19,8 miliar. "Masih ada kekurangan sekitar Rp 28 miliar. Tapi nanti selama September bisa meraup hingga Rp 25 miliar. Kecenderungan WP itu membayarkan PBB jelang jatuh tempo pada 30 September," paparnya, Jumat (7/8).

Terkait layanan jemput bola, imbuhan Santoso, selalu digelar tiap tahun. Pihaknya menggandeng BPD DIY untuk menyediakan loket mobile. **(R-2/Dhi)-k**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005